

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kapasitas**

Kemampuan suatu sistem politik menurut G. Almond terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif. Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi dari pada masyarakat no demokratis. Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan, perilaku regulatif bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya (Hari dan Winarno, 2010: 45).

Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka bentuk kapasitas pemerintah daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas Regulasi (mengatur), yang berupa kemampuan pemerintah daerah mengatur kehidupan pemerintah daerah beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan daerah, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

2. Kapasitas Ektraktif, kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset daerah untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat.
3. Kapasitas Distributif, yaitu kemampuan pemerintah daerah membagi sumber daya daerah secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Ketiga kapasitas diatas nantinya akan dielaborasi dengan prinsip tata kelola berupa:

- a. Akuntabilitas, adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan.
- b. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Keadilan, seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan untuk menerangkan kapasitas politik, bentuk kapasitas pemerintahan daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas responsif, kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah.

2. Kapasitas jaringan dan kerja sama, kemampuan pemerintah dan warga masyarakat mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas efektif.

Untuk melihat seberapa baik kapasitas politik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka prinsip-prinsip tata kelola berupa:

- a. Partisipasi, partisipasi dapat dipahami sebagai proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi yang baik adalah ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan politik. Namun kenyataannya masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam proses kebijakan publik. Partisipasi publik bukan merupakan fenomena yang muncul dengan sendirinya, melainkan didorong oleh kesadaran dari struktur maupun kultur yang terdapat atau diciptakan dalam masyarakat itu sendiri.
- b. Transparansi, berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait (seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah) dengan biaya minimal. Dengan transparansi dimungkinkan dilakukannya evaluasi oleh politisi dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses informasi kepada seluruh pihak mengenai pelaksanaan kebijakan mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan

kebijakan. Ada tiga faktor utama dalam transparansi yaitu: 1) ketersediaan data/informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini; 2) kemudahan mengakses data/informasi; serta 3) keseragaman data/informasi yang disampaikan.

Sedangkan kapasitas teknokrasi mencakup pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya.

Ada banyak definisi kapasitas yang telah dikemukakan oleh para pakar, menurut Morgan dalam Soeprpto (2010: 10) kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Menurut Freddy Rangkuti (2005: 94) kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu. Sementara menurut Sumayang (2003: 99) kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari fasilitas biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu, peramalan permintaan yang akan datang akan memberikan pertimbangan untuk merancang kapasitas.

Menurut Grindle (1997: 22) kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan:

1. Dimensi pembangunan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata menejemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem intensif, perlengkapan personil kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial.
3. Dimensi reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan reformasi konstitusi.

Pemahaman tentang kapasitas di atas dapat dikatakan masih terbatas pada aspek manusianya saja (*human capacity*). Pengembangan SDM ini harus menjadi prioritas pertama oleh pemerintah daerah, karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor non-manusia secara optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu daerah secara komprehensif tidak hanya tercermin dari kapasitas SDMnya saja, namun juga kapsitas yang bukan berupa faktor manusia (*non-human capacity*), misalnya keuangan dan sarana/prasarana atau infrastruktur.

Dari kapasitas tersebut terdapat tiga elemen penting untuk kapasitas tersebut yaitu:

1. Kebijakan kapasitas, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan.

2. Implementasi kewenangan, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
3. Operasional efisien, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayan umum secara efektif dan efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, dan kapasitas terdapat tiga elemen penting yaitu kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, operasional efisien.

## **B. Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Pemerintahan**

Menurut Poerwadarminta secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah, yang dibagi menjadi 3 pengertian (Poerwadarminta, 2006: 141) yaitu sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang dimaksud menyuruh melakukan sesuatu.

2. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

3. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan Negara itu sendiri.

Menurut Samuel Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti sempit: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh eksekutif.
2. Pemerintah dalam arti luas: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Sedangkan menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pemerintah adalah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adala Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan dalam arti sempit adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

## 2. Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hanif Nurcholis, 2011: 36).

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self cpmunity yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

### 3. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab Kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

#### **C. Kemiskinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) miskin adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kebijakan itu lebih utama daripada kekayaan. Pengertian miskin tingkat 1 adalah keadaan yang membutuhkan pokok sandang, pangan, dan papan yang tidak dapat terpenuhi. Miskin tingkat 2 adalah apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi tetapi tidak untuk sekunder. Miskin tingkat 3 adalah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak untuk tersier. Miskin tingkat 4 adalah terpenuhi primer, sekunder, tersier, tetapi tidak bisa menjamin (diakses dari <http://kbbi.web.id/miskin.html> pada 18 Februari 2018).

Miskin atau Kemiskinan terdiri dari tiga macam yaitu kemiskinan absolut, relatif/struktural, dan kemiskinan kultural. Pengertian dari tiga macam kemiskinan yang ada, sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut adalah atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum.
2. Kemiskinan relatif/struktural adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang ataupun keluarga itu tinggal.
3. Kemiskinan kultural adalah keadaan dimana individu ataupun kelompok memilih untuk atau mengambil sikap untuk tidak memperbaiki taraf hidupnya yang sekarang dikarenakan budaya yang dimilikinya.

Secara konseptual pakar-pakar yang mengkaji bidang kemiskinan, memberikan sudut pandang yang relatif berbeda tentang kemiskinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu oleh Theodorson & Achelle Theodorson (1967) bahwa seorang ahli sosiologi memberikan konsep kemiskinan sebagai suatu keadaan masyarakat yang secara moral dan material berada di bawah standar kehidupan yang ditentukan oleh masyarakat (Tantoro, 2014:28)

Mukherjee dan Carriere (2002) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana orang mengalami berbagai ancaman untuk boleh hidup layak. Hal ini termasuk tidak cukupnya penggunaan, kelemahan, pendidikan yang rendah, tidak memadainya perkhidmatan kesehatan asas, kemudahan asas yang boleh menyediakan keperluan sehari-hari minimum dan kurangnya peluang untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik sebagai sesama (Tantoro, 2014:29).

Gejala ini tidak mengherankan, karena teori ini dibentuk atas dasar kepincangan ekonomi dalam masyarakat atau atas dasar pendekatan ekonomi dalam memahami kemiskinan. Terdapat banyak sekali teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun apabila dipermudahkan, sekurang-kurangnya dalam konteks perbincangan ini, maka terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan yakni teori neo-liberal dan sosial demokrat yang memandang kemiskinan dari kacamata struktur dan individu.

Berdasarkan kajian diatas menjelaskan bahwa miskin dan kemiskinan itu memiliki perbedaan dan kesamaan. Untuk perbedaannya, secara garis besar yang dimaksud dengan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang dimana akan selalu ada yang tidak terpenuhi, sedangkan kemiskinan mencakup beberapa faktor, salah satunya dimana suatu kondisi kehidupan yang lebih memperhatikan atau membandingkan dengan lingkungan sekitar, kemudian faktor keinginan dalam merubah taraf kehidupan. Dan letak persamaan miskin dan kemiskinan yaitu suatu

kondisi dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan dalam artian akan selalu mengalami ketidak cukupan tidak dalam kehidupannya.

### **1. Faktor Penyebab Kemiskinan**

Menurut Cox (1998) Teori Neo-Liberal secara tuntas mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah karena beberapa kelemahan, yaitu: 1) Kelemahan dan pilihan-pilihan individual. 2) Lemahnya pengaturan pendapatan, 3) Lemahnya kepribadian individu (malas, pasrah, dan bodoh). Sedangkan menurut teori sosial demokrat penyebab kemiskinan secara struktural adalah karena ketimpangan struktur ekonomi dan struktur politik yaitu suatu ketidakadilan sosial dalam masyarakat (Tantoro, 2014:38).

Berdasarkan teoriCox memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural.Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan kepincangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan.Teori yang berpaksikan pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan menejemen ekonomi keynesian ini, muncul sebagai jawaban terhadap kemelesetan ekonomi yang berlaku pada tahun 1920 dan awal 1930.

Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang mempunyai atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup.Menurut Cheyne et al (1998) kebebasan lebih

daripada sekedar bebas dari pengaruh luar, melainkan pula tidak dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*), dengan kata lain kebebasan berarti memiliki keupayaan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya kemampuan memenuhi keperluan dasarnya, kemampuan mengelakkan kematian awal, kemampuan mengelakkan kekurangan gizi, keupayaan membaca, menulis dan berkomunikasi (Tantoro, 2014:39).

Sistem negara kebijakan yang menekankan pentingnya pengurusan dan pembiayaan negara dalam pemberian pengkhidmatan sosial asas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan keselamatan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi pengurusan-permintaan” (*demand-management economics*) gaya keynesian ini. Walaupun tidak bersetuju sepenuhnya terhadap sistem pasaran bebas, kaum sosial demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai sesuatu yang jahat (*evil*). Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi paling efektif.

## **2. Strategi Pengentasan Kemiskinan**

Teori Neo-Liberal dan Sosial Demokrat telah mencari strategi dasar untuk penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan kepada kemiskinan ekonomi. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya, jika kuasa-kuasa pasaran diperluas senasar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung strategi pengentasan kemiskinan harus bersifat “*residual*”, sementara

dan hanya melibatkan keluarga, kumpulan-kumpulan badan bukan atau lembaga-lembaga keagamaan. Peranan negara hayalan sebagai “*penjaga malam*” yang baru boleh ikut campur manakala institusi-institusi di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon 1991; Spicker 1995; Cheyne, et al). Program-program *structural adjustment*, seperti, Program Rangkaian Keselamatan sosial atau Jaringan Keselamatan Sosial (JPS), di beberapa negara merupakan contoh konkrit dari pada pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

Kerja Sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan kemahiran profesional yang mengutamakan prinsip keberfungsian sosial (*social functioning*) (Siporin 1975; Zastrow 1982; Morales 1989; Suharto 1997). Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “keupayaan” (*Capability*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peranan-peranan sosial di lingkungannya. Konsep ini mengutamakan nilai bahwa pelanggan adalah subjek pembangunan, bahwa pelanggan mempunyai keupayaan dan potensi yang boleh dibangunkan dalam proses pertolongan, bahwa pelanggan mempunyai dan/atau boleh menjangkau, memanfaatkan, dan menggerakkan aset dan sumber-sumber yang ada di sekitar kita.

Bagong Suyanto (1995) mengemukakan 4 (empat) usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, yaitu: *pertama*, berupaya mengurangi ketergantungan dengan pihak lain. *Kedua*, berupaya mendapatkan bantuan untuk modal usaha. *Ketiga*, dasar harga bagi orang-orang miskin. *Keempat*, berupaya mengembangkan kemampuan untuk mempunyai kemahiran dan kepakaran. Beliau mengemukakan strategi untuk mengurangi kemiskinan, ada 4 (empat) strategi yang perlu dikembangkan (Tantoro, 2014:51), yaitu:

1. Rangkaian sosial yang membentuk kerjasama untuk memenuhi keperluan hidup.
2. Strategi untuk mengatasi kesulitan yaitu dengan memberbagaikan sumber usaha untuk meningkatkan pendapatan.
3. Strategi untuk menghadapi masa depan yaitu dengan menabung, mengikuti latihan kemahiran, yang sesuai dengan keperluan pasaran.
4. Strategi hidup hemat, dengan mengatur pola makan, belanja dan pola konsumtif

#### D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Ulima Islami</b> (2016) Topik : Kapasitas Aparatur Desa Dalam tertib Administrasi Desa ( Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Manggala Kabupaten Tulang Bawang).	Fokus Penelitian ini adalah tentang Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa.	Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai Tentang Kapasitas Pemerintahan Desa.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari teori yang digunakan, peneliti ini melihat dari Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi.
2	<b>Irfan Agustian Iswandaru</b> (2005) Topik : Peran Pemerintah	Penelitian ini adalah tentang Peran Pemerintah Daerah dalam	Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari teori yang

	Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo.	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo.	Pemerintah Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan.	digunakan, peneliti ini melihat dari Peran Pemerintah Daerah dan dalam Penanggulangan kemiskinan.
<b>3</b>	<b>Luthfi Fariz Gifary (2017)</b> Topik :Kapasitas Pemerintahan Desa (Studi Kasus Penurunan Angka Kemiskinan di Desa kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.	Fokus penelitian ini tentang Kapasitas Pemerintahan Desa dalam menanggulangi Kemiskinan di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.	Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang Kapasitas Pemerintahan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari lokasi penelitian dan Kapasitas Pemerintahan Desa tentang penanggulangan kemiskinan.

## E. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.**



Berdasarkan gambar diatas bahwasannya kapasitas pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan sangat penting dengan tanggung jawab untuk mengatur desa nya sendiri. Maka dari itu pemerintahan desa kertaharja melaksanakan program dari pemerintah Kabupaten Ciamis melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), Rastra, dan Tiga Kartu(Walagri, Waluya, dan Calakan). PKH adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang dalam target jangka pendeknya bertujuan untuk terlaksananya pemanfaatan fasilitas pendidikan ataupun fasilitas kesehatan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan Pangan (Beras), dan Tiga Kartu

Ajaib adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan Kartu Ajaib (Calakan bantuan Pendidikan, Waluya bantuan Rumah Tangga Tidak Layak Huni, dan Wakagri bantuan Kesehatan).